

**PROSPEK PENGATURAN *UNRULY PASSENGER* DI INDONESIA
BERDASARKAN PROTOKOL MONTREAL 2014**

Gledys Deyana Wahyudin

ABSTRAK

Unruly Passenger dapat mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan, serta dapat menyebabkan *delay* ataupun pendaratan darurat. Namun dikarenakan kekosongan hukum dalam peraturan yang berlaku saat ini, serta kekuasaan yurisdiksi yang terbatas, *unruly passenger* kerap terbebas dari hukuman. Dalam hukum publik internasional, yurisdiksi mempunyai hubungan yang erat dengan kedaulatan. Yurisdiksi merupakan komponen yang sangat penting dalam kenegaraan dan merupakan hak dari suatu negara untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya. Protokol Montreal 2014 merupakan instrumen hukum internasional yang hadir untuk mengisi kekosongan hukum dalam peraturan yang berlaku sebelumnya. Protokol Montreal 2014 membawa perubahan diantaranya perluasan yurisdiksi, perluasan definisi terhadap pelanggaran yang dilakukan di pesawat udara, *right of recourse*, dan peran *In Flight Security Officer* (IFSO). Skripsi ini membahas keperluan Indonesia untuk memperluas yurisdiksinya seperti yang diatur dalam Protokol Montreal 2014 terutama pada penerbangan internasional. Melihat angka *unruly passenger* yang semakin meningkat dan desakan dari perusahaan maskapai penerbangan Indonesia untuk segera meratifikasi Protokol Montreal 2014, Peratifikasian Protokol Montreal 2014 di Indonesia sangat diperlukan.

Kata kunci : *unruly passenger*, keselamatan penerbangan, Protokol Montreal 2014.

**PROSPECT OF UNRULY PASSENGER REGULATION IN INDONESIA
BASED ON MONTREAL PROTOCOL 2014**

Gledys Deyana Wahyudin

ABSTRACT

Unruly Passenger can threaten aviation security and safety, and cause delays or emergency landings. But due to loopholes on the existing laws, and lack of choice jurisdiction, unruly passenger are often unpunished. In public international law, the concept of jurisdiction has a strong relationship with the notion of sovereignty. Jurisdiction is a very important component in statehood and an authority for the state to make its legal decisions and judgments. The Montreal Protocol 2014 is an international legal instrument that is present to fill the legal loopholes in previously applicable regulations. The Montreal Protocol 2014 brought changes including the extension of jurisdiction, expanding the definition of violations committed in aircraft, right of recourse, and the role of In Flight Security Officer (IFSO). This thesis discusses Indonesia's interest to extend it's jurisdiction as regulated in the Montreal Protocol 2014, especially on the international flights. The increasing number of unruly passenger and the pressure from Indonesian airline companies to immediately ratify the Montreal Protocol 2014, the ratification of the Montreal Protocol 2014 in Indonesia is very important.

Key words: unruly passenger, flight safety, Montreal Protocol 2014.